

FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Dini Arwati, Dini Verdania Latif
Universitas Widyatama, Bandung
dini.arwaty@widyatama.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian berbagai *literature* dari berbagai negara tentang factor penghambat partisipasi public dalam pencegahan korupsi melalui aplikasi *E- government* di Indonesia. Kemajuan teknologi secara langsung berdampak pada setiap aktivitas yang digunakan baik kegiatan pemerintahan maupun perusahaan. Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan adalah dengan penerapan *e-government*. *E-government* dapat mempercepat pekerjaan dan mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Penerapan *e-government* tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi tanpa adanya partisipasi public dalam bentuk pengawasan aktivitas pemerintahan. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, seperti, Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR), yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP), aplikasi *Clue* yang terdapat di Jakarta *Smart City*, *Command Center* milik Pemerintah Kota Surabaya, aplikasi ini telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan tindakan pelanggaran ataupun penyelewengan.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pencegahan korupsi, e-government di Indonesia

Abstract

This article is a review of various literature from various countries about the factors inhibiting public participation in the prevention of corruption through the application of e-government in Indonesia. Technological advances directly have an impact on every activity used both government and corporate activities. Another effort taken to prevent corruption in government is by implementing e-government. E-government can accelerate work and be able to provide transparent and accountable information. The application of e-government will not be effective in preventing corruption without public participation in the form of supervision of government activities. Several facilities have been provided to enable interaction between the government and the community, such as The People's Online Complaint Aspiration Service (LAPOR), initiated by the Presidential Staff Office (KSP), the Clue application located in Jakarta Smart City, the Surabaya City Command Center, this application has provided an opportunity for the public to actively participate in development and improve service quality public. The community is expected to play an active role in reporting acts of violation or fraud.

Keywords: Public Participation, Prevention of corruption, and e-government in Indonesia

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya pemerintah belum berhasil mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International, indeks persepsi korupsi di Indonesia pada saat ini, menempati peringkat ke 96 dari 180 negara. Kondisi ini juga sama dengan tahun sebelumnya. Indeks persepsi korupsi menunjukkan angka 37. Indeks persepsi korupsi dari Transparency International menggunakan skala 0-100.

Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan sama sekali untuk mengurangi tingkat korupsi (detikNews, 2018). Korupsi paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Seperti suap dan korupsi dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakkan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. Sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

Banyak sekali peluang untuk melakukan fraud, antara lain ada enam peluang yang berkaitan dengan faktor faktor internal control, sedangkan lima lainnya tidak; yaitu kurang atau lemahnya pengendalian yang mencegah dan atau mendeteksi perilaku curang, ketidakmampuan menentukan kualitas kerja, kurangnya tindakan yang bersifat kedisiplinan, Informasi yang tidak utuh, kekurangan akses terhadap informasi, acuh tak acuh dan apatis, tidak adanya jejak audit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan pada tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Menurut Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, salah satu upaya untuk mendorong perbaikan indeks persepsi korupsi adalah dengan penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terdapat tiga fokus utama dalam perpres ini yaitu keuangan negara, perizinan, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Keuangan Negara meliputi penerimaan dan pengeluaran negara, mulai dari perencanaan dan implementasinya. Dalam hal perizinan, harus dilakukan secara transparan (Kompas.com, 2018). Keuangan negara adalah semua hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Semua masalah yang menyangkut tentang kekayaan milik negara atau segala sesuatu milik negara yang dapat dinilai dengan uang, baik yang berada dalam kepengurusan lembaga lembaga atau bank bank pemerintah yang ditetapkan dengan undang undang. Kekuasaan pemerintah yang dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya keuangan negara.

Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan adalah dengan penerapan *e government*. Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan KPK mendorong penerapan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah praktik korupsi. *E-government* dapat mempercepat pekerjaan dan mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. (Republika.co.id). Penerapan *e-government* tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi tanpa adanya partisipasi publik dalam bentuk pengawasan aktivitas pemerintahan. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, seperti, Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP), aplikasi Clue yang terdapat di Jakarta Smart City, command-center milik Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi ini telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan tindakan pelanggaran ataupun

penyelewengan (Soegiono, 2018).Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang diukur dengan menggunakan *e participation index* menempati ranking ke 92 dari 193 negara di dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor yang menghambat tingkat partisipasi publik dalam *e government* di Indonesia. Metode yang di gunakan adalah studi literatur.

METODOLOGI

E-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi komputer oleh pemerintah, masyarakat, institusi politik untuk mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan umpan balik sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pemerintahan di berbagai institusi pemerintah. *E government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi adminstrasi dan mengurangi korupsi (Bhatnagar Subhash, 2004).

Bentuk-bentuk Aplikasi *E-Government*

Berbagai Bentuk-bentuk aplikasi dari penggunaan *e-government* adalah :

- a. *e-budgeting*,
e-budgeting adalah aplikasi teknologi informasi komputer untuk fungsi anggaran, prosedur, atau layanan di seluruh siklus anggaran (perencanaan, pemrograman, penganggaran, alokasi, kontrol, dan evaluasi sumber daya keuangan).
- b. *e-procurement*,
e procurement merupakan sistem pengadaan. Sistem ini mampu mengendalikan kegiatan pengadaan barang. Sistem ini membantu petugas keuangan mencocokkan pembelian dengan pesanan pembelian, tanda terima, dan kartu pekerjaan. Sistem e-procurement juga mengelola tender melalui situs web.
- c. *e-audit*,
e-uudit, adalah audit yang dibantu komputer yang menggunakan catatan elektronik untuk menyelesaikan semua atau sebagian dari audit. E audit dapat di lakukan jika institusi menggunakan komputer untuk merekam aktivitasnya.
- d. *e-catalog*,
Merupakan Katalog elektronik dalam publikasi online yang berupa graphic dan grafis antarmuka, umumnya berupa halaman html di mana produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ditampilkan.
- e. *e-payment*
e payment merupakan sistem pembayaran elektronik dengan cara membayar barang atau jasa secara elektronik, daripada menggunakan uang tunai atau cek.
- f. *e-participation*
e-participation adalah istilah yang mengacu pada partisipasi yang didukung TIK dalam proses yang terlibat dalam pemerintah dan pemerintahan". Proses in berkaitan dengan administrasi, pelayanan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Tujuan Penerapan *E-Government*

Tujuan penerapan *e-government* (Brown, 2013):

1. Ketersediaan informasi pemerintah melalui internet, seperti peraturan-peraturan, jadwal audiensi publik, ringkasan masalah, anggaran dan realisasinya, laporan kinerja pemerintah.
2. Menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga Negara, bisnis ataupun lembaga pemerintahan lainnya.
3. Memudahkan masyarakat melakukan transaksi misalnya untuk pembayaran pajak, permohonan layanan hibah, pengurusan surat ijin.
4. Mengaktifkan transisi warga dari akses informasi pasif ke partisipasi aktif warga

Penggolongan *E- Government*

E-Government digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui *website*
2. Tingkat ke dua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor perwakilan melalui email
3. Tingkat ke tiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik
4. Level terakhir adalah interaksi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama

Partisipasi masyarakat melalui *e government*

Salah satu tujuan *e government* adalah mencegah terjadinya korupsi dengan menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga Negara. Warga Negara perlu dalam kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi *e-participation* dan praktik tata kelola yang baik untuk membantu agar berhasil menerapkan kebijakan, program, dan proyek yang terkait dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian mengenai *e government* yang di lakukan oleh United Nation menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang diukur dengan menggunakan *e participation index* masih rendah, yaitu menempati ranking ke 92 dari 193 negara di dunia.

E - participation Index (EPI)

Dengan pengembangan *e-participation* sebagai bagian dari *e government* diharapkan terjadi peningkatan akses warga negara terhadap informasi dan layanan publik, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik secara umum, dan khususnya kepada individu. United Nation telah mengembangkan ukuran untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat yang di namakan *E - participation Index (EPI)*. Ukuran ini meliputi ketersediaan :

E-information

Mengaktifkan partisipasi dengan memberikan informasi publik kepada warga dan akses ke informasi tanpa atau atas permintaan

E-consultation

Melibatkan warga dalam kontribusi dan pertimbangan mengenai kebijakan dan layanan public.

E-decision-making

Memberdayakan warga melalui sarana *co-design* untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan opsi kebijakan dan *co-production* untuk memperbaiki komponen kebijakan yang sudah ada. EPI adalah penilaian komparatif dan kualitatif dari mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah di masing-masing negara. Meskipun metrik ini bukan merupakan hal yang mutlak, diharapkan dengan adanya EPI ini, dapat diukur kinerja.

Kinerja masing-masing negara. EPI dihitung sebagai berikut:

$$EPI = \frac{(\text{Nilai partisipasi suatu negara} - \text{nilai partisipasi terendah})}{\text{nilai total keseluruhan}}$$

Nilai *e-participation* dihitung berdasarkan jawaban kuesioner yang meliputi pertanyaan mengenai informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk warga, jejak pendapat online, dan forum diskusi online.

Contoh penerapan *E participation*

Beberapa contoh penerapan *e participation* di beberapa negara :

Korea

Korea telah menyediakan aplikasi yang dinamakan *Online Citizen Participation Portal* dan *Administrative Information Disclosure System*. Aplikasi ini telah dibuat sejak tahun 2006. *Online Citizen Participation Portal* menyediakan layanan di mana warga dapat mengajukan pengaduan, proposal kebijakan, terlibat dalam diskusi kebijakan, dan membentuk komunitas online. Layanan ini juga terpadu terkait dengan semua kementerian dan lembaga. *Administrative Information Disclosure System* merupakan layanan terpadu di mana warga dapat melihat daftar dokumen pemerintah dan meminta informasi yang diperlukan secara online (Shim dan Eom, 2008)

Republik Armenia

Penelitian yang di lakukan oleh Filatova, dkk (2017) menunjukkan bahwa situs web yang ada di Armenia hanya memenuhi dua karakteristik dari EPI yaitu e-information dan *e-consultation*. Warga negara hanya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah melalui suatu forum internal. Yang menarik, situs web terkadang memiliki informasi tersedia tentang partisipasi publik mengenai kementerian yang disponsori suatu lembaga tertentu. Namun, tidak ada mekanisme warga Negara untuk dapat berinteraksi dengan pemerintah.

Federasi Rusia

Situs web Rusia memiliki struktur yang lengkap. Terdapat informasi mengenai kementerian, dokumen, dan Hubungan Publik. Situs web pemerintah Federasi Rusia memenuhi standar *e-participation* dalam pengambilan keputusan, yang memiliki ciri adanya informasi tentang peristiwa, partisipasi masyarakat dengan menggunakan e-voting atau teknologi referendum. Tetapi pengguna hanya dapat terlibat dengan pelayanan melalui komunikasi email. Situs web juga sudah terintegrasi dengan media social Filatova, dkk (2017).

***E-Participation* di Indonesia**

Pemerintah bersama koalisi masyarakat sipil telah meluncurkan suatu program pemerintahan yang terbuka melalui Open Government Indonesia pada tahun 2017. Program ini diharapkan dapat diterapkan di Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Tujuan program ini untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel. Program Open Government ini merupakan pelembagaan partisipasi publik yang disusun secara partisipatif, untuk menjangkau aspirasi publik melalui kemitran antara pemerintah dengan publik. Diharapkan pemerintah pemerintah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah betul-betul yang dibutuhkan oleh publik (GeoTimes, 2017).

Berdasarkan penelitian Putra (2017), di kabupaten Boyolali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan inovasi pelayanan publik yang berupa perizinan online. Dalam penerapannya DPMPTSP telah memberikan fasilitas yang sangat memadai sehingga masyarakat tinggal menggunakan fasilitas tersebut. Namun ternyata tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem online adalah rendahnya pengetahuan masyarakat karena rendahnya sosialisasi mengenai sistem online, kemampuan komunitas untuk menggunakan sarana / prasarana pendukung yang belum optimal, kualitas internet jaringan tidak memadai di beberapa daerah, layanan online rendah, dan kesadaran masyarakat yang menginginkan perubahan bertentangan dengan masyarakat lainnya.

Penelitian yang di lakukan oleh Aprianti (2016), di kecamatan Sambutan, Samarinda telah dilakukan penerapan e government dan sudah dilakukan sosialisasi secara langsung mengenai adanya pelaksanaan e-government kepada para tokoh masyarakat dan diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat luas, tetapi berdasarkan wawancara langsung ternyata sebagian masyarakat masih belum mengenal adanya pelaksanaan e-government di kantor kecamatan Sambutan. Pengetahuan masyarakat mengenai e government masih sangat terbatas. Selain itu, website masih sulit di akses dan masih terdapat kesalahan dan terbatasnya informasi yang diberikan. Interaksi antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat offline.

Hasil penelitian Abadi (2014) mengenai e government di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan beberapa hambatan dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini karena

jaringan on-line yang sering rusak, adanya mutasi jabatan terhadap staf yang memiliki keahlian / kompeten, dan lambatnya respon terkait dengan permintaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat terhadap penerapan *e government* masih rendah, hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai data dan informasi pemerintah masih belum diperhitungkan secara signifikan kontribusinya dalam memerangi korupsi. Rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan *website* masih sulit di akses dan masih terdapat kesalahan dan terbatasnya informasi yang diberikan. Interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dengan masyarakat yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat offline. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai aktivitas dan langkah langkah pencegahan korupsi mengenai aplikasi elektronik government. Kurang atau lemahnya pengendalian yang mencegah dan atau mendeteksi perilaku curang, ketidakmampuan menentukan kualitas kerja, kurangnya tindakan yang bersifat kedisiplinan, informasi yang tidak utuh, kurangnya akses terhadap informasi, acuh tak acuh dan apatis, dan tidak adanya jejak audit. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (*risk based audit*), dan membangun jaringan informan (*audit intellegince*) dengan tetap bersikap hati hati dengan indikator komunikasi informal audit dengan pihak internal dimana komunikasi dalam suasana formal merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi auditor baik secara verbal maupun tertulis. Dan audit untuk menerima masukan pengaduan dimana strategi audit centre merupakan pelengkap dari pengembangan informasi informal.

KESIMPULAN

Faktor penghambat partisipasi public dalam pencegahan korupsi melalui aplikasi elektronik government di Indonesia, masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai data dan informasi pemerintah. Juga kurangnya pengetahuan langkah atau cara dalam aplikasi elektronik government, kurangnya sosialisasi mengenai sistem online, kemampuan komunitas untuk menggunakan sarana / prasarana pendukung yang belum optimal, kualitas internet jaringan yang tidak memadai di beberapa daerah, layanan online rendah dan kurang respon, dan kesadaran masyarakat yang menginginkan perubahan bertentangan dengan masyarakat lainnya, *website* masih sulit di akses dan masih terdapat kesalahan kesalahan dan terbatasnya informasi yang diberikan. Interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten, dengan masyarakat yang berkaitan dengan keterbukaan / transparansi informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat offline

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Totok Wahyu Abadi (2014). Performance E-government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. *Kawistara*, 4, 225-330.
- Aprianty, Diah Rachma (2016). Penerapan Kebijakan E-government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4 (4): 1589-1602.
- detikNews (2018). Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96
<https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>
- Bhatnagar, Subhash (2004), *E-Government – From Vision to Implementation*, SAGE Publications, New Delhi
- Brown, Mary Maureen, 2013. "Electronic Government" Jack Rabin (ed.). *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Marcel Dekker, pp. 427–432.
- Filatova, O., Balabanova, S., Golubev, V., & Ibragimov, I. (2017). E-participation in EEU countries: A case study of government websites
<https://spbu.pure.elsevier.com/en/publications/e-participation-in-eeu-countries-a-case-study-of-government-websi>
- Geotimes (2017). Pemerintah Luncurkan Sistem Partisipasi Publik
<https://geotimes.co.id/berita/pemerintah-luncurkan-sistem-partisipasi-publik/>
- Geotimes (2018). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
<https://geotimes.co.id/opini/indeks-persepsi-korupsi-indonesia/>
- Kompas.com (2018). Tahun Depan, KPK Targetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/07232881/tahun-depan-kpk-targetkan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-meningkat?page=all>.
- Putra, Mohammad Toha (2017). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam E government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali. *Journal of Politic and Government Studies*, 6 (4).
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/vostro/My%20Documents/Downloads/17471-35691-1-SM.pdf>
- Republika.co.id (2017). KPK Dorong Penerapan E-Government untuk Cegah Korupsi
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/05/opftj3354-kpk-dorong-penerapan-egovernment-untuk-cegah-korupsi>
- Shim, Dong Chul Shim, Tae Ho Eom (2008). E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis of International Data
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900690701590553>
- Soegiono, Agie Nugroho (2018). Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data

***Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan
Ekonomi Lokal***

https://www.researchgate.net/publication/327032564_Agenda_Open_Government_Memerangi_Korupsi_Melalui_Inisiatif_Open_Data

(2) Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data | Request PDF. Available from

https://www.researchgate.net/publication/327032564_Agenda_Open_Government_Memerangi_Korupsi_Melalui_Inisiatif_Open_Data [accessed Aug 20 2018].